

Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Daerah Dalam Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang

Zainiyah Lailatul Fitriyah¹ M. Wimbo Wiyono² Khoirul Ifa³
 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang
zainiyahlailatulf@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2016. Penelitian ini berusaha menjelaskan mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PP No. 71 Tahun 2010) pada perlakuan akuntansi aset tetap Pemerintah Kabupaten Lumajang terutama untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetap. Penelitian dilakukan di DPKAD Kabupaten Lumajang dengan metode deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa aset tetap di Kabupaten Lumajang dapat langsung diakui ketika barang sudah datang atau ketika telah terjadi transaksi, pengukuran awal aset tetap menggunakan harga perolehan, penyusutan aset tetap dan menggunakan metode garis lurus, penilaian kembali (revaluasi) aset tetap tidak dilakukan, aset tetap sudah disajikan dengan benar di neraca, rincian serta informasi aset tetap sudah diungkapkan dengan benar dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK). Perlakuan akuntansi aset tetap di Kabupaten Lumajang secara umum sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam (PP No. 71 Tahun 2010).

Kata Kunci : Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan, Aset Tetap

Abstract

This study aims to in order to understand the accounting treatment being handed out the fixed assets of the district government lumajang for financial statements that expires on 31 December 2016 .This research trying to work out as to the applicability of the standard imposed peuangan (PP No. 71 Years 2010) on an accounting treatment being handed out the fixed assets of the district government lumajang especially to the following confession in reference , the measurement of , the appearance of the and state disclosure the fixed assets .The research was being conducted in dpkad kabupaten lumajang with the methods descriptive of quantitative .Based on the results of the analysis it was discovered that the the fixed assets in kabupaten lumajang can be directly recognized when the goods for coming or when there has been a more the transactions that take place , the measurement of the beginning of the fixed assets on the old price of publicly listed financial services company , the fixed assets amount of shrinkage i achieved has been done and uses the method a straight line , the revaluation of (revaluasi) the fixed assets has not been carried out , the fixed assets have been served with right on the balance sheet , the details of and the information the fixed assets have been the fund raising program disclosed correctly in a note upon a financial report what happened.

Keywords: Recognition, Measurements, The Presentation of, The Disclosure, Fixed Assets.

PENDAHULUAN

Lahirnya otonomi daerah (otoda) merupakan salah satu tuntutan dari reformasi dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. Era transparansi dan globalisasi merupakan suatu fenomena bagi setiap entitas organisasi dalam mempertanggung jawabkan setiap pekerjaan yang dilakukan kepada para stakeholder sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pemerintah sebagai salah satu entitas pelaporan wajib untuk menyajikan laporan keuangan dengan baik agar menghasilkan informasi keuangan yang relevan dan reliable bagi pengguna laporan keuangan.

Penyelenggaraan akuntansi pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 07 PP 71/2010 memuat aturan penyusunan standar, penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi, penafsiran informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Berdasarkan PP No.

71 tahun 2010 pemerintah pusat dan daerah harus menerapkan akuntansi akrual penuh (*full accrual accounting*) bukan lagi kas menuju akrual (*cash towards accrual*) yang diterapkan selambat-lambatnya tahun 2015. Provinsi Jawa Timur masih ada daerah-daerah yang belum memperlakukan asetnya dengan benar atau sesuai PP No. 71 tahun 2010. Hal ini terbukti dengan adanya daerah yang selalu gagal mendapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) karena pengungkapan aset yang tidak sesuai standar. Tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah untuk menganalisis perlakuan akuntansi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Halim (2007:42) adalah proses Pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda (kabupaten, kota, atau provinsi).

Perkembangan Akuntansi Pemerintah Daerah

Seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikansi adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintah. Perubahan di bidang akuntansi pemerintah ini sangat penting karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing.

Aset

Aset menurut Sumarsan (2013: 14) adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan. Dari segi waktu, aset dibagi menjadi aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset perusahaan yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan atau 1 tahun.

Pengertian Aset Tetap

Aset tetap merupakan salah satu elemen dari aset pada neraca yang digunakan dalam laporan keuangan suatu SKPD. Pada umumnya setiap Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) memiliki aset tetap untuk menunjang kegiatan yang dilakukan. Definisi aset tetap menurut PSAP 07 paragraf 5-6 SAP PP 71/2010 aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Klasifikasi Aset Tetap

Menurut PSAP 07 SAP PP 71/2010 aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap yaitu : Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.

Pengakuan Aset Tetap

Pengakuan merupakan suatu proses pencatatan item-item harta, hutang, modal, pendapatan, dan biaya, termasuk di dalamnya bagaimana menyajikan item tersebut di dalam laporan keuangan. Sedangkan Menurut PSAP 07PP 71/2010, untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria yaitu : Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengukuran Aset Tetap

Pengukuran (*measurement*) merupakan proses penentuan jumlah rupiah untuk menentukan makna ekonomi dari suatu aset yang akan disajikan dalam neraca (Chariri dan Ghazali 2005:235). Menurut PSAP 07 dijelaskan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Penyajian Aset Tetap

Menurut PSAP 01 SAP PP 71/2010, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Perhitungan yang berkaitan dengan pos aset tetap yang sudah relevan, akurat dan dapat diukur secara andal tersaji pada laporan sebagai berikut : Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan; Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu; Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

Pengungkapan Aset Tetap

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut: Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode; Informasi penyusutan.

Penelitian Terdahulu

1. Anggraini (2014) dengan judul *Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah (Studi Fenomenologi pada Pengelolaan Candi Borobudur)*. Hasil dari penelitian menyatakan Bahwa belum ada definisi aset bersejarah yang tepat. Hal tersebut dibuktikan oleh paparan sebagai besar informan yang selalu mengaitkan definisi aset bersejarah dengan definisi cagar budaya sehingga terdapat kerancuan diantara keduanya. Selain itu, pihak pengelola candi borobudur masih mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian pada aset bersejarah. Namun, praktik akuntansi pada pengelolaan candi borobudur dinilai sudah sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu disajikan dan diungkapkan dalam CaLK tanpa nilai.
2. Andriyani (2008) melakukan penelitian dengan judul *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Daerah dalam Penyusunan Neraca pada Pemerintahan Kabupaten Jember*. Hasil dari penelitian menyebutkan Perlakuan akuntansi aset daerah dalam penyusunan neraca Pemerintahan Kabupaten Jember telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, namun ada beberapa hal yang masih belum tepat dalam perlakuannya, yaitu penyajian dalam laporan keuangan perhitungannya tidak sesuai.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Dengan menggunakan metode kuantitatif ini maka data yang didapatkan akan lebih lengkap, lebih mendalam dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Penelitian dilakukan di kantor Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang. Adapun yang menjadi obyek penelitian adalah pemahaman aparatur pemerintah di bidang akuntansi dan aset dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010 dalam proses penyusunan Laporan Keuangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder karena data berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yang diperoleh dari DPKAD Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2016.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai data Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca di pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2016, dimana data penelitian ini diperoleh dari Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang.

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah:

1. Mengumpulkan data mengenai objek penelitian
2. Membandingkan antara data yang diperoleh dari Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang dengan SAP PP No. 71 Tahun 2010 Berbasis Akrua terutama PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.
3. Mengevaluasi kebenaran data aset tetap dalam rangka evaluasi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.
4. Menyimpulkan kondisi penerapan akuntansi sesuai PP No.71 Tahun 2010

Hasil Pengumpulan Data

Tabel 1
Neraca
Per 31 Desember 2016 dan 2015

(dalam Rupiah)

Uraian	2016 (Audited)	2015 (Audited)
ASET TETAP		
Tanah	3.266.196.667	3.266.196.667
Peralatan dan Mesin	8.547.391.566	6.697.631.166
Gedung dan Bangunan	4.132.410.100	4.132.410.100
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	1.044.500	945.000
Kontruksi Dalam Pengerjaan	55.103.000	0
Akumulasi Penyusutan	(6.173.995.869)	(4.854.714.576)
Total Aset Tetap	9.828.149.964	9.242.468.357

Sumber : Neraca DPKAD Kab. Lumajang

Tabel 2
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016 (audited)	%	Realisasi 2015 (audited)
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	0	0	0	0
Belanja Peralatan dan Mesin	1.944.885.000	1.849.760.400	93,87	805.832.000
Belanja Gedung dan Bangunan	150.000.000	55.103.000	36,74	102.704.500
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.200.000	99.500	8,29	945.000
Total Belanja Modal	2.096.085.000	1.904.962.900	88,36	909.481.500

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran DPKAD Kab. Lumajang

Hasil Analisis Data**Pengakuan Aset Tetap**

Pemerintah mengakui suatu aset tetap apabila aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya, dan pada saat penguasaannya berpindah. Oleh karena itu, apabila belum ada bukti bahwa suatu aset dimiliki atau dikuasai oleh suatu entitas maka aset tetap tersebut belum dapat dicantumkan di neraca. Perolehan aset tetap melalui pembelian atau pembangunan pada umumnya didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum Daerah. Dokumen sumber untuk merekam pembayaran ini adalah SP2D-LS. Realisasi belanja modal melalui mekanisme SP2D-LS akan dicatat oleh DPKAD pada akun Belanja Modal Aset Tetap pada Laporan Realisasi Anggaran. Jurnal pengakuan belanja modal yang di buat DPKAD adalah sebagai berikut :

1. Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kas Daerah (Untuk mencatat realisasi belanja modal)	Rp 1.849.760.400	Rp 1.849.760.400
---	------------------	------------------

2. Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kas Daerah (Untuk mencatat realisasi belanja modal)	Rp 55.103.000	Rp 55.103.000
---	---------------	---------------

3. Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Kas Daerah (Untuk mencatat realisasi belanja modal)	Rp 99.500	Rp 99.500
--	-----------	-----------

Jurnal pendamping (korolari) atas penambahan aset tetap adalah sebagai berikut :

Tanah	Rp 3.266.196.667	
Peralatan dan Mesin	Rp 8.547.391.566	
Gedung dan Bangunan	Rp 4.132.410.100	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp 0	
Aset Tetap Lainnya	Rp 1.044.500	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 55.103.000	
Diinvestasikan dalam Aset Tetap		Rp 16.002.145.833
(Untuk mencatat perolehan semua jenis aset tetap)		

Pengakuan Aset Tetap**a. Penilaian Awal Aset Tetap**

Penilaian awal suatu aset tetap yang diperoleh dari pembelian sebesar nilai perolehannya yaitu sebesar realisasi belanja modal yang menggambarkan jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh barang tersebut sampai siap dipakai. Perolehan aset tetap pada DPKAD Kabupaten Lumajang yang diperoleh dari pembelian langsung adalah peralatan dan aset tetap lainnya adalah :

1. Aset tetap yang diperoleh dari pembelian

Aset yang diperoleh dalam bentuk pembelian diukur berdasarkan biaya perolehan. Aset tetap yang diperoleh dari pembelian langsung adalah :

- a. Realisasi belanja modal Alat-alat angkutan yang menambah aset tetap peralatan dan mesin meliputi : Mobil Panther ISUZU PickUP dan Sepeda Motor sebesar Rp 781.390.200,00 yang dibeli tahun 2016.
- b. Realisasi belanja modal Alat-alat kantor dan rumah tangga yang menambah aset tetap peralatan dan mesin meliputi : kalkulator, rak kayu, meja rapat lipat, UPS, komputer, laptop, tablet, hardisk, mesin porporasi, meja staf, printer dan mesin penghitung uang sebesar Rp. 1.068.370.200,00 yang dibeli tahun 2016
- c. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya yang bersumber dari pembelian tahun 2016 adalah Buku Peraturan Perundang-undangan pada dinas DPKAD sebesar Rp 99.500,00.

b. Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan. Pengeluaran untuk pemeliharaan tidak menambah nilai aset tetap dan diakui sebagai belanja pemeliharaan. Sedangkan pengeluaran untuk peningkatan merupakan belanja modal, harus dikapitalisasi untuk menambah nilai aset tetap tersebut. Pengeluaran-pengeluaran yang digunakan selama penggunaan aset tetap pada DPKAD Kabupaten Lumajang yaitu : Biaya pemeliharaan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memelihara aset agar tetap dalam kondisi yang baik dan meningkatkan kapasitas. Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin di DPKAD Kabupaten Lumajang sebesar Rp 51.993501,00 dan biaya pemeliharaan bangunan gedung kantor sebesar Rp 145.239.500,00 (Sumber: daftar belanja DPKAD Kabupaten Lumajang 2016).

c. Pengukuran Berikutnya terhadap Pengukuran Awal

Pengukuran berikutnya terhadap pengukuran awal menurut PSAP 07 SAP PP 71/2010 meliputi beberapa hal, diantaranya :

a. Penyusutan

DPKAD Kabupaten Lumajang untuk laporan keuangan yang berakhir ditahun 2016 sudah dilakukan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap tahun selama masa manfaatnya, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per tahun} = \frac{\text{Nilai Yang Dapat Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}} \times 100\%$$

Atau

$$= \text{Nilai Yang Dapat Disusutkan} \times \text{Tarif penyusutan per tahun}$$

Kendaraan roda dua di peroleh tahun 2012 dengan harga perolehan Rp. 16.000.000,00, maka penyusutan per tahun Rp.2.000.000,00. dihitung sebagai berikut :

$$\text{Rp. 16.000.000.}$$

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Rp. 16.000.000.}}{\text{8 tahun}} = \text{Rp. 2.000.000.}$$

$$\begin{aligned} \text{Atau} &= \text{Rp.16.000.000.} \times 12,5\% \text{ (lihat tabel)} \\ &= \text{Rp. 2.000.000.} \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa akumulasi penyusutan 31 Desember 2016 sebesar Rp 6.173.995.869,00.

Jurnal untuk penyusutan DPKAD Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Beban Penyusutan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Untuk mencatat penyusutan)	Rp 6.173.995.869	Rp 6.173.995.869
--	------------------	------------------

b. Penilaian Kembali (*Revaluation*)

DPKAD tidak melakukan penilaian kembali terhadap aset tetap kecuali untuk aset yang belum ada nilainya.

Penyajian Aset Tetap

Penyajian aset tetap dalam lembar muka neraca adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Neraca
Per 31 Desember 2016 dan 2015

Uraian	(dalam Rupiah)	
	2016 (Audited)	2015 (Audited)
ASET TETAP		
Tanah	3.266.196.667	3.266.196.667
Peralatan dan Mesin	8.547.391.566	6.697.631.166

Gedung dan Bangunan	4.132.410.100	4.132.410.100
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	1.044.500	945.000
Kontruksi Dalam Pengerjaan	55.103.000	0
Akumulasi Penyusutan	(6.173.995.869)	(4.854.714.576)
Total Aset Tetap	9.828.149.964	9.242.468.357

Sumber : Neraca DPKAD Kab. Lumajang

Akumulasi Penyusutan disajikan dalam angka negatif untuk mengurangi total nilai aset tetap. Penyajian akun terkait aset tetap yaitu akun Belanja Modal disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan akun Beban Penyusutan disajikan pada Laporan Operasional. Penyajian kedua laporan tersebut dilihat pada Tabel 4. dan Tabel 5.

Tabel 4
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015
(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016 (audited)	%	Realisasi 2015 (audited)
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	0	0	0	0
Belanja Peralatan dan Mesin	1.944.885.000	1.849.760.400	93,87	805.832.000
Belanja Gedung dan Bangunan	150.000.000	55.103.000	36,74	102.704.500
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.200.000	99.500	8,29	945.000
Total Belanja Modal	2.096.085.000	1.904.962.900	88,36	909.481.500

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran DPKAD Kab. Lumajang

Tabel 5
Laporan Operasional
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2016	2015	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN				
3					
4	BEBAN				
5	Beban Pegawai				
6	Beban Persediaan				
7	Beban Jasa				
8	Beban Pemeliharaan				
9	Beban Perjalanan Dinas				
10	Beban Bunga				
11	Beban Subsidi				
12	Beban Hibah				
13	Beban Bantuan Sosial				
14	Beban Penyusutan	1.581.430.644	0	1.581.430.644	0
15	Beban Transfer				
16	Beban Lain-lain				
17	Jumlah Beban	1.581.430.644	0	1.581.430.644	0

Sumber : Laporan Operasional DPKAD Kab. Lumajang

Pengungkapan Aset Tetap

Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting tercantum dalam neraca. DPKAD Kabupaten Lumajang pengungkapan aset tetap sudah mengungkapkan mengenai

rincian daftar perkembangan jenis aset tetap, rincian penambahan aset tetap. Hal ini dapat dilihat dari laporan dalam CaLK berikut ini.

Tabel 5
Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap
Pemerintah Kabupaten Lumajang
Per 31 Desember 2016

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo
		31 Des 2015	Bertambah	Berkurang	31 Des 2016
1	Tanah	3.266.196.667	0	0	3.266.196.667
2	Peralatan dan Mesin	6.697.631.166	1.849.760.400	0	8.547.391.566
3	Gedung dan Bangunan	4.132.410.100	0	0	4.132.410.100
4	Jalan, Irigrasi, dan Jaringan	0	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	945.000	99.500	0	1.044.500
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	55.103.000	0	55.103.000
	Jumlah	14.097.182.933	1.904.962.900	0	16.002.145.833

Sumber : CaLK DPKAD Kabupaten Lumajang

Tabel 6
Rincian Penambahan Aset Tetap Tahun 2016

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2016 yang menambah aset tetap	1.849.760.400,00
3	Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2016	99.500,00
4	Realisasi belanja modal konstruksi dalam pengerjaan yang bersumber dari APBD tahun 2016 adalah Perencanaan Pembangunan Gg.Kantor (4 UPT. pada DPKAD) dan Honorarium Tim Perencanaan utk Rehab Kantor DPKAD	55.103.000,00
	Total	1.904.962.900,00

Sumber : CaLK DPKAD Kabupaten Lumajang.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap di Kabupaten Lumajang dapat langsung diakui ketika barang sudah datang atau ketika telah terjadi transaksi, pengukuran awal aset tetap menggunakan harga perolehan, penyusutan aset tetap dan menggunakan metode garis lurus, penilaian kembali (revaluasi) aset tetap tidak dilakukan, aset tetap sudah disajikan dengan benar di neraca, rincian serta informasi aset tetap sudah diungkapkan dengan benar dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK). Perlakuan akuntansi aset tetap di Kabupaten Lumajang secara umum sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam (PP No. 71 Tahun 2010).

KESIMPULAN

DPKAD Kabupaten Lumajang sudah menggunakan basis accrual untuk laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2016. Pengakuan aset tetap, DPKAD Kabupaten Lumajang untuk laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2016 sudah mengikuti aturan dari PSAP 07 PP 71/2010. Pengukuran aset tetap mengenai penilaian awal, pengeluaran setelah perolehan, penilaian kembali, DPKAD Kabupaten Lumajang untuk laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2016 sudah mengikuti aturan dari PSAP 07 PP 71/2010. Penyajian aset tetap, DPKAD Kabupaten Lumajang untuk laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2016 sudah benar dan sesuai dengan PSAP 07 PP 71/2010. Pengungkapan aset tetap, DPKAD Kabupaten Lumajang untuk laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2016 sudah benar dan sesuai dengan PSAP 07 PP 71/2010.

SARAN

Perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada pengelolaan aset tetap daerah. Peningkatan kualitas tersebut dapat ditempuh melalui jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, pelatihan insentif, serta meminta bantuan konsultasi pada tim ahli. Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, peran lembaga diklat juga sangat diperlukan untuk membangun atau meningkatkan kompetensi dari aparatur pemerintahan yang bertugas di dalam menyiapkan, menyusun dan mengaudit laporan keuangan pemerintah. Masyarakat perlu didorong untuk mampu memahami laporan keuangan pemerintah sehingga dapat mengetahui dan memahami penggunaan atas penerima pajak dari masyarakat maupun pengalokasian sumber daya yang ada. Pemerintah pusat maupun daerah diharapkan lebih berkoordinasi dengan aparatur terkait untuk memberikan pelatihan dan bimbingan dalam bentuk seminar maupun Work Shop kepada pengelola barang milik daerah agar lebih mengerti tentang pengelolaan barang yang benar. DPKAD diharapkan lebih berkoordinasi dengan tiap-tiap SKPD untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan barang milik daerah dan juga diharapkan bisa meng-upgrad sistem aplikasi pengelolaan barang menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, Lysa. 2008. *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset daerah Dalam Penyusunan Neraca Pada Pemerintah Kabupaten Jember*. Universitas Brawijaya: Malang.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta.
- Bastian, Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Publik*. Edisi Kedua. Salemba Empat: Jakarta.
- Chariri, Anis dan Imam Ghozali. 2005. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi. Cetakan kedua. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Fahmal, Muin. 2008. *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih*. UII Press: Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Herry. 2011. *Teori Akuntansi*. Edisi Pertama, cetakan ke-2. Kencana: Jakarta.
- Herry dan Widyawati L. 2011. *Akuntansi Keuangan Menengah*. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Kasiram. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. (Online). (<https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kuantitatif.html>). Diakses 05 Maret 2018.
- Kawedar, Warsito et al. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Undip: Semarang.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press: Yogyakarta.
- Media Online Bhirawa. 2015, 09 April. *Karena Aset, Pemkab Selalu Mendapat WTP*. (Online), (http://issuu.com/harianbhirawacetak/docs/harian_bhirawa_edisi_9_april_2015), diakses 05 Februari 2018).
- Media Online detikNews. 2015, 29 Mei. *BPK Minta Pemda Segera Terapkan Laporan Keuangan Berbasis Akrua*. (Online), (<http://news.detik.com/berita-jawa-timur/2929157/bpk-minta-pemda-segera-terapkan-laporan-keuangan-berbasis-akrua>), diakses 05 Februari 2018).
- Media Online Tempo.co. 2010, 08 Agustus. *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. (Online), (<https://nasional.tempo.co/read/269621/aset-berupa-44-bidang-tanah-milik-pemerintah-lumajang-bermasalah>), diakses 05 Februari 2018).
- Nasutio. 2000. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
- Priyono, Karnanto. 2012. *Keandalan Informasi Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrua: Kajian Pengelolaan Aset Tetap Daerah Kabupaten Sampang*. Papua.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Simanjuntak, Binsar H. 2012. *Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia*. www.ksap.org
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Akuntansi Dasar Dan Aplikasi Dalam Bisnis Versi IFRS, Jilid 1*. PT INDEKS: Jakarta Barat.
- Soetedjo, Soengeng. 2009. *Pembahasan Pokok-Pokok Pikiran Teori Akuntansi Vernon Kam*. Airlangga University Press: Surabaya.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2008. *Akuntansi Pemerintahan Daerah : Konsep dan Aplikasi*. Alfabeta: Bandung.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Prenada Media Group: Jakarta.